

ALASAN INDONESIA KELUAR DARI KEANGGOTAAN OPEC PADA TAHUN 2008-2016

Fikri Fauzi

fikrifauzi.official@gmail.com

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jl. Brawijaya Tamantirto, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa
Yogyakarta 55183
Telp. & Fax. 0274-387656

ABSTRACT

This journal aims to analyze about the Reason of Indonesia Withdraws from OPEC Membership on 2008-2016. To analyze the case, this journal adopt the theory of Foreign Policy Decision Making by William D. Coplin. The 171st Conference of OPEC in Vienna, Austria, resulted in cutting the production quota of crude oil 1.2 barrels per day of the total production. In dealing with the result of the conference, Indonesia's Government decided making policy withdraw from OPEC membership. The policy was influenced by three determinants, namely: domestic politics condition, economic condition, and international context. Those three determinants influenced a lot Indonesia's foreign policy decision making. Thus, it is not appropriate with Indonesia's national interest which influences economic within country and the number of receiving country especially in the sectors of oil and gas. The policy of OPEC on cutting the production quota of crude oil inflicts Indonesia in financial loss as an oil importer country.

Key word: OPEC, Production Quota, Crude Oil, Indonesia's Policy.

INTISARI

Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis tentang alasan Indonesia Keluar dari Keanggotaan OPEC pada Tahun 2008-2016. Untuk menganalisis studi kasus tersebut, jurnal ini menggunakan teori Pembuatan Kebijakan Luar Negeri menurut William D. Coplin. Sidang Konferensi OPEC ke-171 di Wina, Austria menghasilkan keputusan untuk memotong kuota produksi minyak mentah sebesar 1,2 juta barrel per hari dari total produksinya. Dalam menyikapi keputusan pemotongan kuota produksi minyak mentah tersebut, pemerintah Indonesia memilih untuk mengambil kebijakan keluar dari keanggotaan OPEC. Kebijakan tersebut dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu: kondisi politik dalam negeri, kondisi ekonomi, dan konteks internasional. Tiga faktor tersebut sangat berpengaruh terhadap pembuatan kebijakan luar negeri Indonesia. Dengan demikian sangat tidak sesuai dengan kepentingan nasional Indonesia yang mana akan mempengaruhi terhadap perekonomian dalam negeri dan jumlah penerimaan negara terutama pada sektor minyak dan gas. Kebijakan OPEC untuk memotong kuota produksi minyak mentah akan merugikan Indonesia sebagai negara importir.

Kata kunci: OPEC, Kuota Produksi, Minyak Mentah, Kebijakan Indonesia.

I. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai salah satu negara penghasil minyak bumi di kawasan Asia Tenggara tergabung dalam organisasi negara-negara pengekspor minyak yaitu OPEC (*Organization of the Petroleum Exporting Countries*). OPEC merupakan organisasi permanen non-pemerintah yang dilahirkan dari hasil Konferensi Baghdad, Iraq pada 10-14 September 1960 atas inisiatif lima negara: Iran, Iraq, Kuwait, Arab Saudi dan Venezuela (OPEC, 2017). Indonesia resmi bergabung dengan OPEC pada tahun 1962 dan menjadi satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang tergabung dalam keanggotaan organisasi negara-negara pengekspor minyak dunia.

Sejak berdirinya Sekretariat OPEC di Wina tahun 1965, Kedutaan Besar Republik Indonesia-Wina selalu terlibat aktif dalam kegiatan pemantauan harga minyak dan penanganan masalah substansi serta diplomasi di berbagai persidangan yang diselenggarakan oleh OPEC. Dalam organisasi ini, Indonesia pernah memainkan peran penting, yakni ketika Prof. Subroto menjadi wakil Indonesia terpilih sebagai Presiden Konferensi OPEC pada periode 31 Oktober 1984-9 Desember 1985. Setelah itu, beliau menjadi Sekretaris Jenderal *Organization of the Petroleum Exporting Countries* (OPEC) selama dua periode (1988-1991 dan 1991-1994). Peran keanggotaan Indonesia dalam OPEC mencapai puncaknya pada tahun 2004. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (MESDM) Purnomo Yusgiantoro terpilih menjadi Presiden OPEC dan Sekjen OPEC.

Namun, seiring berjalannya waktu dan perubahan-perubahan yang mengiringi perjalanan Indonesia di OPEC, tentu saja hal ini akan berpengaruh terhadap keanggotaannya. Sejak pertengahan tahun 2014 hingga awal tahun 2016 harga minyak dunia mengalami penurunan yang diakibatkan oleh meningkatnya produksi dan konsumsi dunia. Setelah harga minyak tak kunjung naik sedangkan jumlah produksi dan konsumsi minyak di negara-negara produsen semakin meningkat, OPEC mengeluarkan kebijakan untuk memangkas

jumlah produksi minyak mentah dengan tujuan untuk menaikkan harga minyak dunia.

Sekilas berbalik ke belakang, pada tahun 2008 pemerintah Indonesia pernah mengambil kebijakan untuk keluar dari keanggotaan OPEC yang dilatar belakangi oleh status Indonesia sebagai negara pengimpor minyak dengan tingkat produksi yang terus menurun sehingga menyebabkan adanya perbedaan kepentingan antara Indonesia dan OPEC. Pada tanggal 30 November 2016, OPEC mengadakan sidang konferensi OPEC ke-171 di Wina, Austria yang menghasilkan kesepakatan untuk memotong kuota produksi minyak mentah sebesar 1,2 juta barrel per hari dari total produksinya. Kesepakatan tersebut disetujui oleh seluruh negara anggota OPEC, kecuali Indonesia yang tidak menyepakati kebijakan tersebut.

Berdasarkan kebijakan Indonesia tidak menyepakati atas pemotongan produksi yang dikeluarkan oleh OPEC dapat dilihat dari semua tujuan dasar pemerintah Indonesia mengaktifkan kembali keanggotaannya di OPEC pada awal tahun 2016, yaitu sebagai tindakan untuk meningkatkan ketahanan energi. Hal ini berhubungan dengan kondisi Indonesia yang memiliki kebutuhan energi cukup tinggi dan terus meningkat (Republika, 2015). Oleh karena itu, dengan berbagai pertimbangan dan melihat tujuan awal Indonesia bergabung dengan OPEC, pada waktu yang bersamaan dalam sidang konferensi OPEC ke-171 di Wina, Austria, secara sepihak Indonesia memutuskan untuk keluar dari keanggotaan negara-negara pengekspor minyak ini. Pemerintah Indonesia beranggapan keputusan keluar dari keanggotaan OPEC lebih pas bagi Indonesia mengingat kondisi terkini yang sedang terjadi dan disamping itu tidak berdampak apapun terhadap Indonesia karena tidak terikat dengan kesepakatan-kesepakatan yang berlaku di OPEC.

II. RUMUSAN MASALAH

Mengapa Indonesia keluar dari keanggotaan OPEC pada tahun 2016 ?

III. LANDASAN TEORI

Teori Pembuatan Kebijakan Luar Negeri menurut William D. Coplin

Menurut William D. Coplin kebijakan luar negeri suatu negara dipengaruhi oleh tiga faktor penting, yakni Politik Dalam Negeri, Kondisi Ekonomi dan Militer, dan Konteks Internasional.

1. Kondisi Politik Dalam Negeri

Menurut Coplin, kondisi politik dalam negeri memiliki pengaruh dalam menentukan kebijakan luar negeri suatu negara dan di dalamnya terdapat asumsi tentang perbedaan yang mendasar serta bersifat lintas nasional. Dengan kata lain, setiap kebijakan luar negeri merupakan kelanjutan dari proses politik dalam negeri yang melibatkan berbagai aktor dalam situasi dan kondisi-kondisi tertentu. Situasi politik dalam negeri yang dimaksud adalah interaksi antara pengambil keputusan luar negeri dengan elit politik dalam negeri yang biasa disebut "*policy influencers*". Hubungan antara aktor-aktor dalam negeri dengan pengambil keputusan luar negeri disebut "*policy influence system*". Dalam situasi tersebut antara keduanya terjadi timbal balik sehingga akan mempengaruhi setiap kebijakan yang hendak diambil. Dalam konteks politik dalam negeri tersebut sangat jelas bahwa "*policy influencers*" sangat berpengaruh terhadap kebijakan luar negeri suatu negara. Coplin juga menyebutkan dalam bukunya, bahwa ada empat tipe "*policy influencers*". Pertama, birokrat yang mempengaruhi, kedua, partai yang mempengaruhi, ketiga, kepentingan yang mempengaruhi, dan yang terakhir adalah massa yang mempengaruhi (William D. Coplin, 1992).

2. Kondisi Ekonomi dan Militer

Kondisi ekonomi dan militer memiliki peran penting dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri karena tidak hanya dalam sebuah komitmen, suatu negara harus diimbangi

oleh kekuatan pertahanan dan keamanan serta bersedia untuk menciptakan kemampuan yang diperlukan untuk menopang politik luar negerinya. Dalam analisa Coplin berawal dari perilaku raja-raja Eropa di abad pertengahan yang mana dua hal tersebut saling berkaitan satu sama lain. Ketika kemampuan militer suatu negara semakin meningkat, maka raja dapat mengendalikan perdagangan dan bisnis secara ekstensif (William D. Coplin, 1992).

Kondisi ekonomi suatu negara dapat diukur dengan cara melihat GNP-nya (Gross National Product), yaitu semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dalam satu tahun (Alpari, 1998). Selain GNP, indikator ekonomi lainnya adalah pendapatan perkapita serta dengan melihat potensi pertumbuhan ekonomi negara yang bersangkutan. Sedangkan dalam hal militer, kekuatan militer suatu negara tidak hanya bergantung pada jumlah personal, tingkat pelatihan, dan perlengkapan angkatan bersenjata, tetapi juga bergantung pada tingkat dukungan luar negeri serta peran angkatan bersenjata dalam memelihara stabilitas dalam negeri. Ketika ekonomi dan militer suatu negara sama-sama kuat maka hal tersebut dapat meningkatkan *bargaining position* dengan negara lain (William D. Coplin, 1992).

3. Konteks Internasional

Konteks internasional merupakan aktivitas suatu negara yang melaksanakan politik luar negerinya untuk mempengaruhi negara lain guna kepentingan tertentu. Menurut Coplin, terdapat tiga elemen penting dalam membahas dampak konteks internasional terhadap politik luar negeri suatu negara, yaitu geografis, ekonomis, dan politis. Lingkungan internasional setiap negara terdiri atas lokasi yang didudukinya, dalam kaitannya dengan negara-negara lain dalam sistem itu, juga hubungan-hubungan ekonomi dan politik antara negara itu dengan negara-negara lain. Pada abad ke-20 seorang ilmuwan realis, Hans J. Morgenthau berargumentasi bahwa setiap negara memiliki hubungan tertentu dengan lingkungan internasional yang

ditetapkannya sebagai seperangkat kepentingan nasional yang objektif (William D. Coplin, 1992).

IV. PEMBAHASAN

OPEC adalah singkatan dari *Organization of the Petroleum Exporting Countries*, merupakan organisasi permanen non-pemerintah yang anggotanya adalah negara-negara pengekspor minyak. OPEC resmi didirikan pada 14 September 1960, yaitu merupakan hasil dari konferensi yang diselenggarakan pada 10-14 September 1960 di Baghdad, Iraq. Konferensi tersebut dihadiri oleh Iran, Iraq, Kuwait, Arab Saudi dan Venezuela. Dalam konferensi tersebut setiap negara mengirimkan perwakilannya masing-masing, diantaranya Juan Pablo Pérez Alfonzo yang merupakan Menteri Pertambangan dan Energi Venezuela, Abdullah Al Tariki Menteri Pertambangan dan Energi Arab Saudi, Fuad Rouhani dari Iran, Dr. Tala'at Al Shaibani dari Iraq, dan Ahmed Sayed Omar dari Kuwait.

Berdirinya organisasi negara-negara pengekspor minyak ini dipicu oleh keputusan dari perusahaan-perusahaan minyak multinasional yang memonopoli industri perminyakan dan menetapkan harga secara sepihak pada tahun 1959/1960. Perusahaan minyak tersebut dikenal dengan nama *The Seven Sisters* yang didalamnya terdiri dari tujuh perusahaan minyak besar, diantaranya *Standard Oil Company of California* (Socal) sekarang menjadi Chevron, *Texas Company* (Texaco), *Exxon Mobil*, *Standard Oil Company of New York* (Socony) sekarang menjadi Mobil, *British Petroleum*, *Royal Dutch Shell* dan *America's Gulf Oil* (Wesley D. Crowder, 2014).

OPEC merupakan wahana bagi negara anggotanya untuk menegosiasikan masalah-masalah mengenai produksi, harga, dan konsesi minyak internasional dengan perusahaan-perusahaan minyak yang ada di seluruh dunia. *The Tripoli – Teheran Agreement* adalah sebuah perjanjian antara OPEC dan perusahaan minyak *The Seven Sisters*, perjanjian ini ditanda

tangani oleh kedua belah pihak pada tahun 1970 dan menjadi awal mula yang menempatkan OPEC sebagai sebuah organisasi yang memiliki hak secara penuh dalam menetapkan harga pasar minyak internasional.

Setelah lima negara anggota pendiri kemudian bergabung sepuluh negara anggota lainnya, yaitu: Qatar (1961); Indonesia (1962), pada bulan Januari 2009 menanggihkan keanggotaannya, kemudian mengaktifkannya kembali pada bulan Januari 2016. Namun pada bulan November 2016 memutuskan untuk menanggihkan kembali keanggotaannya; Libya (1962); Uni Emirat Arab (1967); Algeria (1969); Nigeria (1971); Ekuador (1973), menanggihkan keanggotaannya pada bulan Desember 1992, kemudian mengaktifkannya kembali pada bulan Oktober 2007; Angola (2007); Gabon (1975), mengakhiri keanggotaannya pada Januari 1995, kemudian bergabung kembali pada bulan Juli 2006; dan Republik Guinea Khatulistiwa (2017). Sekretariat OPEC pada awalnya bertempat di Jenewa, Swiss (21 Januari 1961-Agustus 1965) kemudian pindah ke Wina, Austria pada tanggal 1 September 1965 (OPEC, 2017).

Pada dasarnya, OPEC menetapkan tujuan yang hendak dicapainya yaitu: memelihara dan meningkatkan peran dari minyak sebagai sumber energi utama dalam mencapai pembangunan ekonomi berkelanjutan (*“Preserving and enhancing the role of oil as a prime energy source in achieving sustainable economic development”*). Selain memelihara dan meningkatkan peran minyak sebagai sumber energi utama, OPEC memiliki tujuan utama yang dibagi menjadi dua, yakni: tujuan ekonomi dan tujuan politik.

A. Tujuan Ekonomi

Secara ekonomi adalah untuk mempertahankan harga minyak dan menentukan harga sehingga menguntungkan negara-negara produsen.

B. Tujuan Politik

Secara politik adalah untuk mengatur hubungan dengan perusahaan-perusahaan minyak asing atau pemerintah negara-negara konsumen (UC, 2016).

Kuota Produksi Minyak OPEC

Kuota produksi minyak OPEC adalah penentuan dari jumlah keseluruhan minyak yang akan diproduksi oleh semua negara anggota OPEC yang nantinya akan diperjual belikan di pasar minyak dunia (Mawikere, 2016). Minyak yang dihasilkan oleh negara anggota OPEC untuk dipasarkan dalam skala internasional adalah sebesar 62%, jumlah tersebut terdiri dari 42% minyak mentah dan sekitar 20% gas.

Tabel Kuota Produksi Minyak OPEC (dalam ribu barrel per hari)

Country	Quota (bbl, 2016) ^[1]	Production (bbl/day, 2016) ^[2]
 Iran	157,530,000,000	3,990,956
 Iraq	143,069,000,000	4,451,516
 Kuwait	101,500,000,000	2,923,825
 Qatar	25,244,000,000	1,522,902
 Saudi Arabia	266,578,000,000	10,460,710
 Algeria	12,200,000,000	1,348,361
 Libya	48,363,000,000	384,686
 Angola	8,423,000,000	1,769,615
 Nigeria	37,070,000,000	1,999,885
 Venezuela	299,953,000,000	2,276,967
 Ecuador	8,273,000,000	548,421
 Gabon	2,000,000,000	210,820
 United Arab Emirates	97,800,000,000	3,106,077
 Equatorial Guinea	1,100,000,000	227,000
OPEC Total	1,209,103,000,000	35,221,740
World Total	1,650,585,000,000	80,622,287
OPEC Percent	73%	44%

Sumber: (OPEC, 2017)

^[1] (Crude Oil Proved Reserves 2016, 2017)

^[2] (Production of Crude Oil including Lease Condensate 2016, 2017)

Kebijakan Indonesia Keluar dari Keanggotaan OPEC pada Tahun 2016

A. Kondisi Politik Dalam Negeri Indonesia

Pada tahun 2008 pemerintah Indonesia pernah mengambil kebijakan untuk keluar dari keanggotaan OPEC yang dilatar belakangi oleh status Indonesia sebagai negara pengimpor minyak dengan tingkat produksi yang terus menurun sehingga menyebabkan adanya perbedaan kepentingan antara Indonesia dan OPEC. Dalam sidang konferensi OPEC ke-168 di Wina, Austria pada tanggal 4 Desember 2015, Menteri ESDM Sudirman Said menegaskan keinginan Indonesia untuk aktif kembali sebagai anggota OPEC (Kementerian ESDM, 2015). Memasuki tahun 2016, tepatnya pada bulan Januari Indonesia resmi kembali bergabung menjadi anggota OPEC.

Keberadaan Indonesia di OPEC sangat dibutuhkan sebagai kepentingan politis karena OPEC tidak hanya melihat dari sisi ekspor saja, terlebih juga menyangkut kepentingan diplomasi. Sehingga membuat OPEC sangat menyambut baik keinginan Indonesia untuk bergabung kembali dengan OPEC.

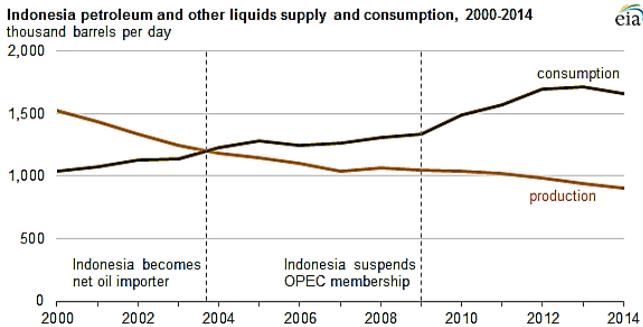
Tujuan Indonesia kembali aktif di OPEC adalah untuk memastikan kepentingan nasional Indonesia tetap terjaga agar lebih mudah mengikuti dinamika dalam industri minyak dan gas sehingga dapat mengetahui informasi naik turunnya harga dan kondisi stok minyak di setiap negara pengekspor minyak khususnya negara-negara anggota OPEC. Tujuan lain Indonesia mengaktifkan kembali keanggotaannya dalam OPEC adalah sebagai tindakan untuk meningkatkan ketahanan energi. Hal ini berhubungan dengan kondisi Indonesia yang memiliki kebutuhan energi cukup tinggi dan terus meningkat.

Namun, belum genap setahun status keanggotaan Indonesia dalam OPEC justru menjadi wacana perdebatan berbagai pihak di dalam negeri sehingga menuai adanya sikap pro dan kontra. Posisi Indonesia di OPEC sudah tidak menguntungkan lagi baik dari sudut pandang dalam negeri maupun kemampuan produksi yang kian merosot akibat tidak mampu memenuhi kuota produksi yang ditetapkan dan mengingat sejak tahun 2003 status eksportir Indonesia sudah berubah menjadi importir minyak menyebabkan tekanan yang dialami semakin besar sehingga memaksa pemerintah Indonesia mengambil kebijakan untuk keluar dari keanggotaan OPEC (Politik Today, 2017).

Oleh karena itu, dengan berbagai pertimbangan dalam sidang konferensi OPEC ke-171 yang dilaksanakan pada tanggal 30 November 2016 di Wina, Austria secara sepihak pemerintah Indonesia mengambil kebijakan keluar dari keanggotaan OPEC. Kebijakan ini lebih pas bagi Indonesia sebagai usaha untuk menyelamatkan minyak dalam negeri. Kebijakan OPEC untuk memotong kuota produksi minyak mentah ini akan merugikan Indonesia sebagai negara importir.

B. Kondisi Ekonomi dan Militer

OPEC yang notabene organisasi pengeksportir minyak menguasai 40% pasar dunia. Negara-negara yang tergabung dalam OPEC sebagai negara produsen dan pengeksportir minyak tentu sebagian besar perekonomiannya sangat bergantung pada hasil ekspor minyaknya dalam membangun perekonomian negara dan menjamin kesejahteraan rakyatnya. Tetapi hal ini tidak terjadi pada Indonesia yang juga tergabung dalam OPEC, minyak bukanlah sumber devisa terbesar bagi pemasukan negara. Berikut adalah data diagram produksi dan konsumsi minyak Indonesia dari tahun 2000-2014.



Gambar

Produksi dan Konsumsi Minyak Indonesia

Sumber: (U.S. Energy Information Administration, 2015)

Berdasarkan diagram di atas tampak jelas, dari tahun ke tahun produksi minyak Indonesia terus menurun, terlebih sekitar akhir tahun 2003 menjadikan Indonesia sebagai *net-importer* sedangkan jumlah konsumsi dari tahun ke tahun semakin meningkat.

Jika dilihat dari segi militer, kebijakan pemerintah Indonesia keluar dari keanggotaan OPEC memang tidak ada kaitannya. Akan tetapi jika dilihat berdasarkan kondisi ekonomi, regulasi pemotongan kuota produksi sebesar 1,2 juta barrel per hari dari total produksinya yang dilakukan oleh OPEC akan merugikan Indonesia. Apabila Indonesia menyetujui kebijakan tersebut maka akan berpotensi terhadap kenaikan harga minyak yang secara otomatis akan menjadi efek domino terhadap harga-harga komoditas di dalam negeri ikut naik sehingga membuat negara terancam mengalami inflasi.

Berdasarkan informasi dari Kementerian ESDM, cadangan minyak mentah terbukti yang dimiliki Indonesia saat ini diperkirakan akan bertahan hingga 23 tahun. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan kenaikan jumlah penduduk, OPEC memperkirakan kebutuhan minyak dunia pada tahun 2040 mencapai 111 juta barrel per hari. Kebutuhan BBM Indonesia

hingga tahun 2040 tumbuh rata-rata sebesar 4,2% per tahun pada skenario *Business as Usual* (BaU). Kondisi ini akan meningkatkan kompetisi mendapatkan pasokan minyak di antara negara konsumen lainnya. Saat ini, 89% impor minyak mentah Indonesia masih bersumber dari negara-negara anggota OPEC antara lain Arab Saudi, Angola, Nigeria, Irak, Qatar, dan Algeria.

Dalam menyikapi kondisi yang terjadi saat ini sebagai negara *net-importer* kebijakan-kebijakan yang kongkret sangat perlu dilakukan oleh Indonesia. Kemudian dengan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang buruk dan tingkat pemakaian BBM dalam negeri semakin meningkat menyebabkan dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan sektor lainnya yang lebih memiliki urgensi justru digunakan untuk mensubsidi BBM.

Dengan demikian, regulasi pemotongan kuota produksi yang dilakukan oleh OPEC sebesar 1,2 juta barrel per hari dan khususnya meminta Indonesia untuk memotong jumlah produksi sebesar 5% atau setara dengan 37.000 barrel per hari akan merugikan perekonomian Indonesia. Kebijakan yang dilakukan pemerintah Indonesia keluar dari keanggotaan OPEC dalam sidang konferensi OPEC ke-171 secara finansial dapat menghemat pengeluaran APBN, sebab setiap anggota OPEC diwajibkan membayar iuran keanggotaan dengan jumlah yang tidak sedikit yaitu sekitar US\$ 2 juta (sekitar Rp.30 milyar) per tahun.

C. Konteks Internasional

Sejak pertengahan tahun 2014 hingga awal tahun 2016 harga minyak dunia mengalami penurunan yang diakibatkan oleh meningkatnya produksi dan konsumsi dunia. Setelah harga minyak tak kunjung naik sedangkan jumlah produksi dan konsumsi minyak di negara-negara produsen semakin meningkat, OPEC melakukan regulasi pemotongan kuota produksi minyak mentah sebesar 1,2 juta barrel per hari dari total produksinya. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menaikkan

harga minyak dunia dalam jangka pendek. Regulasi pemotongan kuota produksi tersebut tidak disetujui oleh Indonesia. Hal ini dikarenakan tingkat produksi minyak mentah Indonesia terus menurun dan semakin langka ditemukannya sumber-sumber minyak baru, sementara konsumsi minyak terus meningkat setiap tahunnya. Dengan melihat kondisi ini tampak jelas terdapat perbedaan kepentingan mendasar antara Indonesia dan OPEC. Perbedaan kepentingan yang terjadi dalam konteks internasional ini tampak jelas ketika Indonesia perlu menambah produksi guna meningkatkan angka penerimaan negara, justru OPEC meminta untuk memotong produksi.

Kebijakan OPEC melakukan regulasi pemotongan kuota produksi sangat berpotensi terhadap kenaikan harga minyak dunia. Kepentingan Indonesia sebagai importir tentu akan berbeda dengan eksportir karena negara yang berstatus sebagai importir pasti menginginkan harga turun dan sebaliknya negara yang berstatus eksportir menginginkan harga naik. Kondisi ini membuat pemerintah Indonesia berani mengambil langkah untuk keluar dari keanggotaan OPEC.

V. KESIMPULAN

Sejak terlibat menjadi anggota OPEC, posisi tawar Indonesia di forum internasional semakin meningkat. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu dan perubahan-perubahan yang mengiringi perjalanan Indonesia di OPEC, tentu saja hal ini akan berpengaruh terhadap keanggotaannya. Sejak tahun 2003 status *net-exporter* Indonesia resmi berubah menjadi *net-importer* minyak mentah. Akibat hal tersebut, status keanggotaan Indonesia dalam OPEC menjadi wacana perdebatan berbagai pihak di dalam negeri sehingga menuai adanya sikap pro dan kontra. Posisi Indonesia dalam OPEC dinilai sudah tidak menguntungkan lagi baik dari sudut pandang dalam negeri maupun kemampuan produksi yang kian merosot akibat tidak mampu memenuhi kuota produksi yang ditetapkan, sehingga menyebabkan tekanan yang dialami semakin besar dan memaksa

pemerintah Indonesia mengambil kebijakan untuk keluar dari keanggotaan organisasi kartel minyak terbesar di dunia tersebut.

Sejak pertengahan tahun 2014 hingga awal tahun 2016 harga minyak dunia mengalami penurunan yang diakibatkan oleh meningkatnya produksi dan konsumsi dunia. Kondisi ini telah mendorong OPEC melakukan regulasi pemotongan kuota produksi minyak mentah sebesar 1,2 juta barrel per hari dari total produksinya. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menaikkan harga minyak dunia. Terlebih Indonesia diminta untuk memotong jumlah produksi sebesar 5% atau setara dengan 37.000 barrel per hari. Namun, Indonesia tidak menyetujui kebijakan OPEC tersebut. Hal ini dikarenakan tingkat produksi minyak mentah Indonesia terus mengalami penurunan secara alami, sementara konsumsi minyak terus meningkat setiap tahunnya. Kebijakan tersebut tentunya akan merugikan dan berimbas pada penerimaan APBN sedangkan kondisi APBN di Indonesia memerlukan perbaikan guna memulihkan dan menstabilkan kondisi perekonomian dalam negeri.

Dengan berbagai pertimbangan, dalam sidang konferensi OPEC ke-171 yang dilaksanakan di Wina, Austria pada tanggal 30 November 2016 secara sepihak Indonesia memutuskan untuk keluar dari keanggotaan OPEC. Pemerintah Indonesia beranggapan kebijakan keluar dari keanggotaan OPEC lebih pas bagi Indonesia mengingat kondisi terkini yang sedang terjadi dan disamping itu tidak berdampak apapun terhadap Indonesia karena tidak terikat dengan kesepakatan-kesepakatan yang berlaku di OPEC. Jika Indonesia tetap aktif sebagai anggota OPEC dapat dipastikan akan sering menghadapi perberbedaan kepentingan, baik dengan OPEC maupun dengan negara-negara anggota OPEC. Itulah alasan yang meyakinkan pemerintah Indonesia dalam mengambil kebijakan luar negerinya dengan keluar dari keanggotaan OPEC. Kebijakan keluar dari OPEC ini merupakan yang kedua kalinya bagi Indonesia karena sebelumnya hal serupa juga pernah dilakukan yaitu pada tahun 2008.

DAFTAR PUSTAKA

- Alpari. (1998). *Glosarium Forex: GNP (Gross National Product)*. Dipetik Januari 11, 2018, dari Alpari: <https://alpari-forex.org/id/beginner/glossary/gross-national-product/>
- Crude Oil Proved Reserves 2016. (2017, Mei 28). Dipetik Desember 18, 2017, dari US Energy Information Administration: <https://www.eia.gov/beta/international/data/browser>
- Kementrian ESDM. (2015, Desember 4). *Reaktifikasi Keanggotaan Indonesia di OPEC*. Dipetik Maret 6, 2018, dari Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Minyak Gas Bumi: <http://migas.esdm.go.id/post/read/reaktifikasi-keanggotaan-indonesia-di-opec#>
- Mawikere, J. C. (2016). Implikasi Kuota Produksi Minyak Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) dengan Kebijakan Keanggotaan dan Harga Bahan Bakar Minyak Pemerintah Indonesia Tahun 2008. *Jurnal Analisis Hubungan Internasional, Vol. 5 No. 3, 4*.
- OPEC. (2017, Desember 13). Dipetik Desember 14, 2017, dari Wikipedia, the free encyclopedia: <https://en.wikipedia.org/wiki/OPEC>
- OPEC. (2017). *Brief History*. Dipetik November 3, 2017, dari The Organization of the Petroleum Exporting Countries: http://www.opec.org/opec_web/en/about_us/24.htm
- OPEC. (2017). *Organization of the Petroleum Exporting Countries*. Dipetik July 31, 2017, dari Brief History: http://www.opec.org/opec_web/en/about_us/24.htm
- Politik Today. (2017, Januari 4). *Opini: Ada Apa Indonesia Keluar Masuk OPEC?* Dipetik Maret 6, 2018, dari Politik Today: <http://politiktoday.com/ada-apa-indonesia-keluar-masuk-opec/>

- Production of Crude Oil including Lease Condensate 2016. (2017, Mei 28). Dipetik Desember 18, 2017, dari US Energy Information Administration: <https://www.eia.gov/beta/international/data/browser>
- Republika. (2015, Desember 4). *Ekonomi: Ini Alasan Indonesia Berupaya Kembali Jadi Anggota OPEC*. Dipetik Januari 4, 2017, dari Republika: <http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/15/12/04/nyueqz349-ini-alasan-indonesia-berupaya-kembali-jadi-anggota-opec>
- U.S. Energy Information Administration. (2015, September 15). *Today in Energy: Indonesia rejoining OPEC despite being a net importer of petroleum*. Dipetik Maret 26, 2018, dari U.S. Energy Information Administration: <https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=23352>
- UC, U. C. (2016, Mei 12). *Tujuan OPEC Bagi Dunia*. Dipetik Desember 3, 2017, dari Entrepreneurship Education Without Boundaries: <http://ciputrauceo.net/blog/2016/5/10/ykuytt3idb1i6ldvt33hs0txgv9lbn>
- Wesley D. Crowder. (2014). *What are the Seven Sisters Oil Companies ?* Dipetik Januari 11, 2018, dari Herold's Financial Dictionary: <https://www.financial-dictionary.info/terms/seven-sisters-oil-companies/>
- William D. Coplin. (1992). Pengantar Politik Internasional. Dalam M. Marbun, *Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaah Teoritis*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.